

DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN TIMUR TENGAH DALAM PERSAINGAN KEKUATAN IRAN DAN AMERIKA SERIKAT

Deni Irawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Katolik
Parahyangan, Indonesia
deni.irwn96@gmail.com

Abstrak

Dinamika keamanan di Wilayah Timur Tengah menjadi sorotan dengan interaksi negara-negara di kawasan Timur Tengah. Interaksi antara Iran dan Amerika Serikat menjadi fenomena menarik baru-baru ini terkait dengan perkembangan ekonomi dan militer Iran yang pesat. Kondisi itu akan berdampak pada keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik dalam beberapa dekade terakhir melihat perkembangan kekuatan militer Iran sebagai katalis terhadap ketidakstabilan kawasan Timur Tengah, terlihat bahwa AS mengorientasikan kembali orientasi kebijakan pertahanan di Pasifik ke Timur Tengah. Keberadaan dua negara dalam upaya merebut dominasi di kawasan Timur Tengah akan berdampak pada keamanan kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu tulisan ini akan berusaha membahas dinamika keamanan kawasan Timur Tengah pada persaingan dua kekuatan, Amerika Serikat dan Iran. Pembahasan akan dimulai dengan menganalisis

hubungan antara dominasi interaksi inter-regional di kawasan Timur Tengah dan mendeskripsikan dominasi AS sebagai kekuatan besar di Timur Tengah yang disaini oleh Iran melalui pengembangan kekuatan militer dan juga akan membahas kebijakan pertahanan AS sebagai respon terhadap pengembangan kekuatan militer Iran di kawasan Timur Tengah, di mana persaingan kedua kekuatan ini diprediksi akan meningkat dalam konflik di Selat Hormuz.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Iran; Perimbangan Kekuatan; Timur Tengah

Abstract

The security dynamics in the Middle East Region are highlighted by the interaction of countries in the Middle East region. The interaction between Iran and the United States has become an interesting phenomenon recently related to Iran's rapid economic and military development. This condition will affect the balance of power in the Middle East region. The United States as a hegemonic power in the last few decades seeing the development of Iran's military power as a catalyst for the instability of the Middle East region, it appears that the US is reorienting the orientation of defense policy in the Pacific to the Middle East. The existence of two countries in the effort to seize dominance in the Middle East region will have an impact on the security of the Middle East region. Therefore this article will try to discuss the security dynamics of the Middle East region in the competition of two powers, the United States and Iran. The discussion will begin by analyzing the relationship between the dominance of inter-regional interaction in the Middle East region and describing US domination as a major force in the Middle East which is rivaled by

Iran through the development of military power and will also discuss US defense policy in response to the development of Iranian military forces in the region Middle East, where competition between the two forces is predicted to increase in the conflict in the Strait of Hormuz.

Keywords: *Balance of Power; Iran; Middle East; United States*

Pendahuluan

Perkembangan sejarah dinamika persaingan kekuatan-kekuatan besar dalam perpolitikan global tidak dapat dilepaskan dari persaingan dalam menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari urgensi wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah sebagai dimensi dalam menjamin persediaan terhadap sumber daya alam tertentu dan sumber pemasukan negara dari hasil perdagangan sumber daya alam tersebut. Akibat dari globalisasi saat ini, membawa dampak terhadap peningkatan perhatian negara-negara terhadap keamanan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sebagai salah satu tempat yang menjadi aset dan sumber perekonomian negara tidak dapat dilepaskan dari berbagai ancaman dan gangguan. Sejalan dengan adanya berbagai gangguan dan ancaman, maka berbagai upaya perlu dilakukan dalam menjaga keamanan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang berupa keamanan wilayah teritorial suatu negara untuk kepentingan negara. Wilayah yang memiliki nilai strategis dan kaya akan sumber daya alam yang saat ini menjadi perhatian negara-negara adalah wilayah Timur Tengah, banyak negara yang menggantungkan kehidupan ekonomi dan keamanannya terhadap persediaan sumber daya alam minyak dari wilayah ini.

Timur Tengah merupakan kawasan yang menghubungkan pasokan persediaan minyak dunia ke seluruh dunia seperti AS, China, Jepang dan Rusia adalah negara-negara besar yang menggunakan pasokan minyak dari Timur Tengah untuk pertumbuhan ekonominya. Timur Tengah di posisikan sebagai *The Jugular of World Economy* (Parvaneh, 2019) bagi negara-negara yang mengandalkan kehidupan ekonominya dari pasokan minyak yang berasal dari Timur Tengah. Oleh karena itu semua negara yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah berupaya menciptakan sebuah kondisi keamanan yang dinamis dan stabil dalam menjamin kepentingan nasional masing-masing negara di kawasan tersebut. Pada awal ke-21 terjadi perubahan dalam pola keamanan di Timur Tengah dengan adanya peningkatan kapabilitas ekonomi dan kekuatan Iran sementara AS mengalami pemangkasan anggaran pertahanan. Dengan kondisi tersebut peningkatan kekuatan Iran di wilayah Timur Tengah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap AS di wilayah Timur Tengah. Dengan begitu maka akan terjadi perubahan dalam interaksi kedua negara yang akan berdampak terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Merujuk pada realitas yang terjadi tulisan ini akan melakukan pembahasan terhadap persaingan kekuatan diantara Iran dan Amerika Serikat dan memberikan gambaran mengenai dampak dari persaingan tersebut dalam konstelasi keamanan dikawasan Timur Tengah.

Tinjauan Teoritis: Keamanan Kawasan

Akhir rivalitas negara superpower pasca Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian perubahan dunia ke dalam sebuah tatanan internasional yang bersifat multipolar

mempunyai implikasi signifikan bagi keamanan regional. Hal ini merupakan suatu usaha yang tidak dapat ditebak sama sekali tetapi dalam waktu yang bersamaan memunculkan harapan untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas yang ingin dicapai melalui konsep dan pendekatan baru mengenai keamanan, yang paling adalah ini menjadi sebuah multilateralisme dan kerjasama keamanan (Acharya, 2002: 2). Terjadinya perubahan terhadap keamanan regional ditandai dengan adanya pertumbuhan multilateralisme keamanan di suatu kawasan dalam hal ini adalah kawasan Timur Tengah yang dimana AS mulai memperluas pengaruhnya dengan melakukan kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk memperkuat keamanannya dari ancaman Iran.

Dalam memahami isu keamanan di suatu kawasan regional kita dapat menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Barry Buzan, bahwa menurut Buzan keamanan adalah fenomena yang relasional (Buzan, 1987: 299). Oleh karena itu keamanan suatu negara dan atau di dalam kawasan tidak akan dapat dipahami tanpa melihat dan memahami pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara dalam suatu kawasan. Dalam memahami keamanan regional, Buzan memberikan penjelasan dalam suatu konsep yang disebut dengan fenomena *security complex*. Definisi *security complex* sendiri merujuk pada penjelasan Buzan (1987) yang didefinisikan sebagai berikut: *“a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another”*.

Berdasarkan penjelasan Buzan, dengan demikian konsep *security complex* ini mencakup aspek persaingan dan juga kerjasama

di antara negara-negara yang terkait. Karakter dalam *security complex* yang mencakup adanya fenomena saling ketergantungan antara rivalitas yang terjadi berbanding lurus dengan adanya kepentingan bersama. Fenomena tersebut yang oleh Buzan disebut dengan pola *amity* dan *enmity* di antara negara-negara. definisi dari *amity* adalah hubungan yang terjadi antar negara dimana interaksi dalam hubungan tersebut dijalin berdasarkan persahabatan dan adanya ekspektasi atau harapan untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *enmity* adalah menurut Buzan, digambarkan sebagai suatu hubungan yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain.

Pola interaksi *amity* dan *enmity* merupakan pemahaman yang baik yang dimulai dari analisis pada level regional serta dengan tambahan dari faktor global dan faktor domestik di sisi lainnya (Buzan & Waever, 2003: 7). Oleh sebab itu dalam menganalisis level keamanan regional digunakan pola *amity* dan *enmity* sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana interaksi yang terjadi apakah kearah yang lebih baik atau meningkatnya tensi ketegangan antara negara-negara dalam kawasan tersebut. Dapat disebutkan ketika terjadi *amity* dalam pola interaksi di suatu kawasan maka dapat dilihat adanya kestabilan dan tingkat keamanan yang relatif stabil di kawasan dan begitu sebaliknya, ketika yang terjadi adalah pola *enmity* dalam suatu kawasan maka yang terjadi adalah tingkat keamanan dalam kawasan tersebut akan rapuh dan rawan untuk terjadinya konflik.

Pola interaksi *amity* dan *enmity* dapat terjadi disebabkan oleh karena berbagai permasalahan bukan hanya akibat dari distribusi

kekuatan yang ada dalam suatu kawasan. Hal tersebut karena *amity* dan *enmity* dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai hal spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnik tertentu, penggolongan dan pengelompokan ideologi, dan warisan konflik lama baik yang bersifat negatif atau positif. Dalam konsep ini *security complex* dapat dilihat dari: pertama, dengan melihat pola *amity* dan *enmity* diantara negara-negara dalam suatu kawasan dan kedua, melihat distribusi kekuatan yang terjadi diantara negara-negara di kawasan tersebut.

Pembahasan

***Enmity* dalam Dinamika Hubungan Iran dan Amerika Serikat**

Iran dan Amerika Serikat memiliki catatan sejarah hubungan yang diwarnai dengan hubungan baik pada awalnya kemudian menjadi ketegangan, khususnya pasca Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada tahun 1979. Kedua negara pernah memiliki hubungan baik, Iran pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi pemerintahan yang dibangun oleh Shah Reza tidak memberikan citra baik terhadap masyarakatnya yang melihat bahwa pemerintahan Shah Reza tidak memikirkan rakyat dan terlalu mengikuti perintah dari Amerika Serikat, hingga akhirnya Iran mengalami revolusi pada tahun 1979 yang berdampak pada sistem politik dan pemerintahan Iran yang mulai menjauh dari AS dan mulai mencoba untuk menjadi negara yang independen dan kuat di kawasan Timur Tengah. Pasca Iran mengalami revolusi, hubungan kedua negara berubah kearah yang lebih negatif. AS melihat revolusi yang terjadi di Iran menyebabkan berubahnya konfigurasi kekuatan di Timur

Tengah karena Iran pasca revolusi tersebut diambil alih oleh elit-elit politik yang menentang ketergantungan terhadap AS.

Dominasi AS dalam level global maupun di kawasan Timur Tengah dalam bidang ekonomi maupun militer menjadi tantangan bagi Iran dalam mengembangkan ekonomi dan militernya. AS sendiri telah menjadi negara yang mendominasi perekonomian dunia sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang ternyata berbanding lurus dengan perkembangan militernya dimana AS mendominasi kekuatan militer diantara negara-negara lain dengan anggaran militer yang mengungguli negara lain. Terlebih ketika Iran mulai mengintegrasikan ke dalam perekonomian global sebagai eksportir minyak dunia dan mulai mengembangkan program nuklirnya untuk mendukung keperluan domestik. AS melihat Iran sebagai suatu ancaman karena hal serupa pernah terjadi pada China, dimana pasca China bergabung menjadi anggota WTO dan menciptakan kondisi interdependensi dengan AS membuat hubungan kedua negara memburuk di kawasan Asia Pasifik (Hufbauer & Woollacoot, 2012: 35). Kemudian permasalahan ekonomi yang terjadi antara AS dan China ekspansi ekspor China yang membuat perekonomian AS melemah karena jumlah ekspor yang semakin banyak maka barang-barang China yang dijual di AS menjadi sangat murah dan mengalahkan produk dalam negeri AS. Kemudian AS merespon dengan mengeluarkan kebijakan proteksionisme yang ditujukan kepada China, yang membuat China memabawa masalah ini ke WTO tetapi ditolak oleh panel WTO (Ikenso, 2012: 2).

Kebijakan yang diambil AS terhadap Iran juga tidak jauh berbeda dengan China. Hal tersebut karena baik Iran dan China merupakan ancaman dalam persepsi keamanan AS di kawasan Timur Tengah

dan Asia Pasifik. Hubungan antara Iran dan AS pasca revolusi Iran terus mengarah pada hubungan yang konfliktual, dimana dalam program pengembangan nuklir Iran, kebijakan yang dikeluarkan AS begitu keras sampai dengan penjatuhan embargo terhadap Iran. AS dibawah Presiden Goerge W. Bush mengeluarkan pernyataan bahwa Iran dibawah Presiden Ahmadinejad telah mengembangkan senjata pemusnah masal (senjata nuklir) (Rahman, 2003). Tekanan yang diberikan AS terhadap program pengembangan nuklir Iran tidak berpengaruh besar terhadap Iran karena program pengembangan nuklir masih berlanjut meskipun AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi sesuai dengan resolusi DK-PBB seperti embargo ekonomi, sanksi ekspor-impor peralatan perang dan pengisolasian Iran dari komunitas internasional (El-Gogary, 2006: 313). Kebijakan luar negeri AS terhadap Iran menghasilkan hubungan yang berkarakter *enmity* dimana hal tersebut ditujukan AS demi mencapai kepentingannya di kawasan Timur Tengah untuk mempertahankan hegemoninya dengan cara melemahkan Iran.

Tekanan demokratisasi dalam level global yang tidak lepas dari peranan AS menjadi kekhawatiran utama bagi Iran. Iran sendiri melihat tekanan yang diberikan AS merupakan proyeksi dari dominasi AS dalam sistem internasional. Kasus revolusi islam Iran tahun 1979 dan krisis penyanderaan kedutaan besar AS di Tehran tahun yang sama hingga program pengembangan nuklir Iran pada pertengahan tahun 1990-an memunculkan tekanan dunia internasional yang dipimpin oleh AS terhadap Iran menggunakan isu demokrasi dan pengembangan senjata nuklir dengan menempatkan Iran sebagai negara yang tidak demokratis dan mengancam kestabilan keamanan di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut

membuat Iran khawatir terlebih jika melihat fenomena yang terjadi di Afrika Barat dan sebagian negara Arab yaitu *Arab Spring*, dimana demokratisasi yang mengusung demokrasi buatan Barat membuat sebagian negara yang mengalami *Arab Spring* menjadi negara yang terjerat konflik dan instabilitas. Iran merespon dengan membantah segala tuduhan yang diarahkan terhadap Iran mengenai isu krisis demokrasi dan pengembangan senjata nuklir. Iran melihat tekanan dunia internasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan campur tangan AS. Sebagai sebuah negara dengan sistem politik teokrasi-demokrasi presidensial senantiasa akan menjadi sasaran terkait isu demokrasi yang sering di usung oleh AS.

Dominasi Kekuatan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah

AS telah menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis pasca berakhirnya Perang Dunia II. Arti strategis kawasan Timur Tengah terhadap AS adalah persepsi AS tentang peningkatan kerentanan militer strategis terhadap Uni Soviet, penggulingan rezim di Iran yang dianggap sebagai ancaman kekuatan di 'Teluk' yang kaya minyak dan konfrontasi terus-menerus dengan kepemimpinan revolusioner di Teheran, invasi mendadak Afghanistan oleh delapan puluh ribu pasukan Soviet, dan meningkatnya ketergantungan jangka panjang pada pasokan energi vital dari Timur Tengah telah menciptakan permintaan, dan peluang besar, untuk perbaikan besar-besaran dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap kepentingan regionalnya (Jabber, 1980: 68). Dalam garis besar umum AS menunjukkan komitmen operasional yang diperluas dan kehadiran militer regional yang ditingkatkan selama Timur Tengah tetap menjadi sumber utama

pasokan minyak untuk industri global.

Hegemoni pengaruh AS di kawasan Timur Tengah menurut beberapa peneliti diperkirakan mulai melemah. Perjanjian antara AS dan Rusia terkait penghapusan program senjata kimia Suriah merupakan contoh yang mengarah pada pembahasan pelemahan AS di kawasan Timur Tengah, keterlibatan Iran dan Hizbullah dalam *proxy war* di konflik Suriah (Abrams, 2013). Tetapi AS dalam segi kekuatan tidak mengalami penurunan sebaliknya mengalami sedikit kenaikan dimana hal ini disebabkan terutama oleh dominasi militer AS, posisi strategis kuat dari sekutu regionalnya dan stagnasi atau penurunan dari pesaing AS. Skenario AS untuk menurunkan kekuatan di Timur Tengah melihat dari potensi ancaman dari Iran bersama sekutunya Rusia dalam memainkan pengaruhnya di konflik Suriah. AS beserta sekutunya berusaha untuk mengembalikan *status quo* dengan terus memberikan tekanan dan meningkatkan kehadiran kekuatan militernya dalam membendung potensi konflik yang terjadi di Suriah agar tidak merembet ke negara-negara sekutu AS di kawasan Timur Tengah.

Kekuatan AS di Timur Tengah ditujukan sebagai *counter-balance* untuk mempertahankan dan sedikit meningkatkan posisi *bargaining* AS dalam upaya penyelesaian yang tengah dilakukan. Pertimbangan AS adalah kekuatan militer sekutu-sekutunya yang cenderung masih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan militer Iran yang terus mengalami peningkatan dan modernisasi. Keberadaan kekuatan militer AS dalam kawasan Timur Tengah dapat dipastikan akan dapat mengimbangi dan membendung kekuatan Iran dan Rusia dalam upaya *counter-balance*. Peningkatan dan modernisasi militer Iran memang belum merupakan sesuatu

ancaman yang nyata karena dalam konflik Suriah sendiri militer Iran tidak berperan langsung dalam eskalasi konflik yang terjadi, tetapi hal ini dapat menjadi suatu ancaman dimasa depan jika tidak ada penyembingan kekuatan atau *counter-balance* maka Iran dapat menjadi ancaman terhadap sekutu-sekutu AS dan kepentingan AS di kawasan Timur Tengah.

Penegasan dari dominasi kekuatan AS di kawasan Timur Tengah di tunjukan melalui peningkatan kekuatan militer yang signifikan. Pada akhir tahun 2013, pangkalan-pangkalan militer disejumlah negara di kawasan Timur Tengah diawaki oleh lebih dari 35.000 tentara AS, termasuk 10.000 tentara yang dikerahkan ke depan medan konflik. Amerika Serikat menyebarkan pesawat tempur canggih kawasan itu, termasuk F-22, serta helikopter serang, baju besi berat, kemampuan pertahanan rudal dan aset intelijen, pengawasan dan pengintaian canggih. Amerika Serikat juga mempertahankan kehadiran angkatan laut besar-besaran di sekitar Semenanjung Arab dan di Laut Mediterania, yang secara rutin melibatkan lebih dari 40 kapal (US Department of Defense, 2013). Pada bulan Juli 2013, Amerika Serikat menambahkan penyebaran hingga 2014 dari kelompok pertempuran kapal induk kedua dengan Armada Kelima, berbasis di Bahrain. Kemudian, pada musim panas 2013, Amerika Serikat berkumpul di Mediterania Timur 'sebagai persiapan untuk serangan akhirnya terhadap Suriah' lima kapal perusak berpeluru kendali kelas *Arleigh-Burke* dan tiga kapal selam berpeluru kendali rudal bertenaga nuklir (Lipin & Seldin, 2013).

Kekuatan militer Israel adalah pasukan tempur paling maju secara teknologi dan terbaik di wilayah Timur Tengah. Angkatan bersenjata Turki, yang terbesar kedua di NATO dengan sekitar 500.000 tentara,

memberi AS sekutu yang kuat, terutama dalam *counter-terrorism*, dan akses ke pangkalan-pangkalan yang berlokasi strategis. Sementara itu, negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyatakan semakin mampu menerjunkan militer kecil namun berteknologi maju. Mereka telah memperoleh sistem senjata mahal dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, mulai dari pertahanan rudal-teater dan kapal-kapal patroli - hingga pesawat tempur-ofensif dan kendaraan-kendaraan lapis baja. Memang, sejak 2007 Amerika Serikat telah menyetujui lebih dari \$ 75 miliar penjualan senjata ke negara-negara GCC (Juneau, 2019).

Kehadiran kekuatan militer A.S. di Timur Tengah tidak tertandingi oleh pasukan regional atau ekstraregional lainnya. Perhitungan yang tepat bervariasi sesuai dengan penyebaran rotasi dan komitmen spesifik dalam pengambilan keputusan AS, tetapi intinya adalah bahwa Amerika Serikat mampu merespon dengan cepat untuk peristiwa jangka pendek dan memiliki kapasitas lonjakan besar karena aset yang diposisikan sebelumnya dan kemampuan transportasi dan logistik yang tidak diimbangi. Militer AS. mampu memproyeksikan dan mempertahankan kehadiran ini berkat jaringan pangkalan dan fasilitas yang tak tertandingi di Kuwait, Qatar, Bahrain, UEA, Siprus, Yordania, dan Turki.

Perkembangan Kekuatan Iran Sebagai Penyeimbang Kekuatan (*Balance of Power*) di Kawasan Timur Tengah

Penyeimbangan Kekuatan atau *Balanca of Power* merujuk pada suatu kondisi adanya distribusi kekuatan diantara negara-negara dalam sebuah sistem baik dalam lingkup internasional maupun

regional. *Balance of power* idelanya akan menjamin bahwa kekuatan (*power*) tersebut terdistribusi dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada negara yang dapat melakukan dominasi terhadap negara lain (Odgaard, 2003: 25). Dalam *balance of Power* terdapat dua pola yakni pola persaingan langsung yang merujuk pada keinginan suatu negara untuk mendahulukan kebijakannya dari kebijakan negara lain. Sedangkan pola kompetisi adalah keinginan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dalam rangka memaksimalkan kebijakannya. Terkait *balance of power* antara Iran dan AS di kawasan Timur Tengah, pola yang terjadi adalah di dominasi pola persaingan secara langsung. Hal ini terkait dengan keberadaan kebijakan-kebijakan Iran dan AS yang ditujukan terhadap satu sama lain.

Iran melihat bahwa dalam konteks hegemoni kekuatan, AS telah mendominasi kawasan Timur Tengah dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bagi Iran, hegemoni kekuatan AS di kawasan di kawasan Timur Tengah menjadi suatu penghalangan dan membatasi Iran untuk meingkatkan dan mempertahankan trend positif perkenomiannya dan stabilitas kawasan, karena ketika kawasan tidak stabil dalam hal ini terdapat satu kekuatan unilatera yang mendominasi maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam sistem. Dalam segi ekonomi Iran merupakan negara pengekspor utama di Timur Tengah terhadap kawasan Eropa dan Asia, dimana Itali dan Spanyol bersama telah mengimpor 10 persen minyak untuk kebutuhan domestiknya dari Iran (The Guardian, 2012). Tetapi dalam kenyataannya, nilai minyak Iran tergantung pada seberapa besar minyak Iran berkontribusi dalam perdagangan global, hal ini yang menjadi kekhawatiran Iran ketika suatu saat AS melakukan

tindakan yang dapat menghentikan produksi atau pasokan minyak Iran ke pasar dunia maka stabilitas nasional Iran akan terganggu. Kemudian dalam segi stabilitas keamanan di kawasan, kehadiran kekuatan AS dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah dari Perang Teluk sampai dengan konflik di Suriah memunculkan kekhawatiran bahwa AS bisa saja membawa konflik yang terjadi masuk kedalam internal Iran, meskipun hal tersebut belum terjadi tetapi AS masih mempermasalahkan program pengembangan nuklir Iran, dibuktikan dengan penarikan diri AS dari perjanjian *Iran Nuclear Deal* pada tahun 2018.

Kekhawatiran Iran berkaca pada visualisasi jaringan pangkalan AS di Timur Tengah cukup luas. Bahkan jika tidak menghitung kehadiran AS di Afghanistan, Amerika Serikat memposisikan banyak pangkalan gugus depan, *Forward Operation Sites* (FOS) dan Lokasi Keamanan Kooperatif, *Cooperative Security Locations* (CSL) dan pasukan di sepanjang pesisir Teluk, serta di Mediterania timur dan di sepanjang Tanduk Afrika. Meskipun angka akurat sulit didapat karena kepekaan politik negara-negara penerima dan perubahan reguler dalam spesifikasi pangkalan karena kebutuhan operasional yang berbeda-beda, situs militer AS di kawasan itu jumlahnya puluhan. Di antara instalasi militer utama AS yang terletak di kampanye CENTCOM adalah Camp Kuwait di wilayah Arifjanin dan Buehring bersama dengan Camp As-Saliyah di Qatar (Lostumbo, 2013: 24). Kemudian, Amerika Serikat juga telah lama bekerja sama secara militer dengan Arab Saudi — musuh bebuyutan Iran — untuk melatih militer Saudi. Amerika Serikat secara luas dianggap memiliki komitmen kuat terhadap keamanan Arab Saudi, tetapi tidak ada perjanjian pertahanan formal antara kedua negara.

Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat mengerahkan puluhan ribu tentara ke Arab Saudi, terutama untuk mempertahankan wilayah itu melawan Irak, tetapi mundur pada 2003 setelah jatuhnya Saddam Hussein. Beberapa ratus pasukan tetap di negara itu untuk mengelola program pelatihan. Washington juga telah melakukan berbagai upaya kerja sama kontraterorisme dengan rezim Saudi, termasuk langkah-langkah untuk bekerja sama untuk memerangi pendanaan terorisme (Blanchard, 2009). Kondisi tersebut mengharuskan Iran membangun kekuatannya agar mampu melakukan *deterrence* terhadap hegemoni kekuatan AS di Timur Tengah.

Respon terhadap kondisi tersebut membuat Iran mengeluarkan kebijakan untuk melawan hegemoni AS dan melindungi multilateralisme di kawasan Timur Tengah. Iran akan merespon hal ini dengan melakukan pengurangan komitmen perjanjian *Iran Nuclear Deal* jika semua tidak mentaati isi dari perjanjian. Iran juga mulai memperketat keamanannya dengan melakukan penembakan jatuh pesawat tanpa awak AS pada bulan Juni 2019 dan hampir menimbulkan serangan balasan dari AS. Tindakan Iran tersebut merupakan komitmen dan respon Iran dalam menentang hegemoni kekuatan AS, dikutip dari pernyataan Wakil Presiden Eshaq Jahangiri bahwa “kebijakan luar negeri Iran adalah untuk melindungi multilateralisme di kawasan Timur Tengah dan menentang hegemoni AS” (Reuters, 2019). Respon yang diberikan Iran terhadap AS sebenarnya disebabkan oleh sikap unilateralisme AS ketika menarik diri dari perjanjian *Iran Nuclear Deal* pada tahun 2015 dan kemudian AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

Iran juga memperkuat basis kekuatannya di kawasan Timur Tengah dengan melakukan *proxy war* dengan mendukung kelompok

Hizbullah di Lebanon dalam upaya melemahkan hegemoni AS. Kemudian Iran juga mendukung Rusia dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukung dan membantu Assad untuk tetap memegang kekuasaan di Suriah. Keijakan Iran terhadap Rusia dan Suriah kemudian keterlibatan Iran dengan Hizbullah di Lebanon memiliki kesamaan yaitu untuk menentang hegemoni AS. Kebijakan luar negeri Iran akhirnya dapat berdampak dalam jangka panjang terhadap hegemoni AS di kawasan Timur Tengah karena konflik yang terjadi Suriah dapat mentidakstabilkan sekutu AS yaitu Yordania, dimana menurut Abrams (2013) menyebutkan bahwa "Kehadiran tiga perempat juta atau sejuta pengungsi Suriah, AS akan dikalahkan dan posisi AS di Timur Tengah mengalami kemunduran bersejarah. Setiap harapan solusi yang dinegosiasikan untuk krisis nuklir Iran akan hilang. Sistem aliansi yang AS bangun di Teluk akan dicabik-cabik karena kredibilitas AS sendiri akan hilang" (Abrams, 2013). Peningkatan kekuatan Iran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Iran, dimana sejak Iran mengalami revolusi islam pada tahun 1979 dan lepas dari cengkraman AS, pembaharuan dan peningkatan dalam perekonomian mulai membaik dengan Iran menjadi salah satu pengeksport minyak dari kawasan Timur Tengah ke pasar global.

Iran dalam upayanya untuk mengimbangi hegemoni AS di pertegas dengan pernyataan Laksamana Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan, "Pendekatan negatif negara-negara lain bukanlah karena sifat kegiatan nuklir, rudal, dan regional yang mengancam Iran. Sebaliknya, hal ini adalah karena penentangan mereka terhadap kekuatan baru Iran dalam hal ini, hanya dengan cara menghimpun kekuatan di kawasan

pada tingkat *hard power* dan *soft power* yang dapat membuat negara mencapai keamanan nasional dan berkelanjutan” (Barzegar, 2018). Dalam perspektif Iran, memang terdapat korelasi langsung antara peningkatan kekuatan Iran dengan tingkat keamanan di kawasan. Hal ini merupakan sesuatu yang signifikan bagi Iran, baik dilihat dari keunikan geopolitik dalam mengintegrasikan ekonomi regional dan mengendalikan ancaman tradisional seperti AS dan non-tradisional seperti terorisme yang mengancam keamanan Iran.

Program pengembangan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir telah membuat kekuatan di regional dan dunia internasional untuk percaya bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) regional berubah mendukung Iran. Meskipun kesimpulan dari kesepakatan nuklir pada Juli 2015 memecahkan masalah ini, kehadiran regional Iran, bersama dengan program rudal canggihnya, telah mencegah peningkatan kerjasama regional dan pembicaraan antara Iran dan para aktor di kawasan seperti Arab Saudi. Iran menolak rencana ekspansionis apa pun di balik aktivitas misilnya, dengan fokus pada aspek pencegahannya dan berargumen bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh rasa tidak aman Iran dari kondisi rivalitas di kawasan dan luar kawasan. Dikutip dari Presiden Hassan Rouhani yang menyatakan bahwa membangun stabilitas dan keamanan sangat penting untuk mendorong aliran investasi asing ke Iran, yang merupakan tujuan utama di balik administrasi teknokratnya dalam menyimpulkan kesepakatan nuklir untuk mencabut sanksi dan menyelesaikan perbedaan strategis antara Iran dan Barat, terutama dengan Amerika Serikat (Barzegar, 2018). Penarikan Trump dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan mengembalikan sanksi

telah membawa kendala geopolitik baru, membuat Iran mencari tindakan kebijakan luar negeri baru, menyesuaikan statusnya dengan lingkungan geopolitik baru dan keseimbangan kekuatan regional. JCPOA berusaha menyeimbangkan dua dimensi kebijakan luar negeri Iran yaitu perlunya kerja sama regional untuk bergabung dengan komunitas internasional dan penyerapan investasi asing melalui membangun stabilitas di wilayah tersebut di satu sisi, dan mencegah ancaman keamanan nasional dari wilayah tersebut di yang lain. Sebagai pelengkap dari prinsip-prinsip JCPOA secara bertahap gagal atau melemah hari ini, aspek pencegahan kebijakan luar negeri Iran menjadi lebih berani dalam kalkulus strategis Iran.

Kemudian, kecenderungan Iran yang terus-menerus untuk meningkatkan kerja sama regional telah terganggu oleh upaya Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel, karena tujuan prospektif mereka adalah untuk melibatkan AS dalam urusan regional, melawan kehadiran regional Iran yang semakin berkembang. Dalam keadaan seperti itu, meskipun pemerintah Eropa, Rusia dan Cina, mendukung penolakan kebijakan Trump, semua indikator menunjukkan bahwa ketakutan sektor swasta mereka dari tindakan balasan AS memaksa mereka untuk mengurangi pertukaran ekonomi mereka dengan Iran. Kemungkinan kendala geopolitik yang muncul terhadap Iran, telah menyebabkan para pemimpin Iran untuk memikirkan strategi “melihat ke dalam” (*inward-looking*), yang didasarkan pada mengandalkan sumber daya yang tersedia sendiri untuk memperkuat sistem independen nasional di sektor ekonomi, politik dan keamanan. Mengandalkan “konektivitas regional” yang kuat, kebijakan ini memiliki dua aspek: Pertama, mengintegrasikan ekonomi Iran ke dalam ekonomi negara lain di kawasan dalam konteks

bilateral atau trilateral untuk memperkuat produk nasional Iran, dengan demikian memproses pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan karakteristik geopolitik lokal. Kedua, mengambil keuntungan dari sentralitas geografisnya untuk meningkatkan peran dan pengaruh politik-keamanannya dalam krisis regional yang sedang berlangsung dalam konteks meningkatkan multilateralisme regional. Kebijakan ini dapat membantu Iran untuk menambah nilai strategisnya dan menyamakan keseimbangan kekuatan regional sesuai keinginannya.

Strategi *inward-looking* Iran di sebutkan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengumumkan bahwa dua prioritas super negara ini selanjutnya akan “berfokus pada masalah ekonomi” dan “memperkuat hubungan di sekitar kawasan” (Zarif, 2017). Kebijakan *inward-looking* juga akan berupaya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan interaktif melalui menghubungkan stabilitas Iran dengan stabilitas kawasan. Seperti yang telah disebutkan, pembentukan kebijakan semacam ini merupakan hasil dari upaya Iran untuk menyesuaikan strategi kebijakan luar negerinya dengan perubahan geopolitik regional. Kebijakan luar negeri Iran berusaha untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan diri antara dua variabel “kerjasama” (*cooperation*) dan “pencegahan” (*deterrence*) di kawasan Timur Tengah. Munculnya ISIS dan saat ini pembentukan koalisi regional melawan Iran, ditambah dengan penarikan Trump dari perjanjian nuklir, meningkatkan rasa tidak aman strategis Iran dan membuat para pemimpin Iran untuk lebih fokus pada aspek pencegahan dari kebijakan luar negeri negara itu. Konsep pencegahan ancaman ini bahkan telah menunjukkan dirinya di bidang keamanan ekonomi Iran.

Konflik Selat Hormuz: Arena Rivalitas Kekuatan Iran dan Amerika Serikat?

Keberadaan kekuatan AS dan Iran di kawasan Timur Tengah tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Baik itu konflik yang melibatkan secara langsung kedua negara tersebut maupun konflik dari sekutu-sekutu negara yang bersangkutan. Dalam kawasan Timur Tengah sendiri terdapat berbagai titik potensi konflik yang terkait dengan ketegangan kekuatan militer yang melibatkan Iran dan negara-negara yang kemudian di dukung oleh AS. Konflik tersebut diantaranya adalah perang antara Iran dan Irak, Perang Teluk I, II dan III dan konflik di Selat Hormuz akibat permasalahan *Iran Nuclear Deal* yang dimana AS menarik diri dari perjanjian tersebut kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang kemudian di respon oleh Iran dengan melakukan pemblokiran kapal kilang minyak yang masuk dan keluar dari Selat Hormuz. Kehadiran AS dalam konflik tersebut disebabkan oleh adanya potensi ancaman atau gangguan terhadap kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah yang kemudian membawa negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut berhadapan dengan Iran. Salah satu konflik yang membuat Iran dan AS berhadapan secara langsung adalah konflik di Selat Hormuz. AS melihat tindakan Iran di Selat Hormuz yang merupakan respon dari kebijakan AS untuk keluar dari *Iran Nuclear Deal* dalam kaitannya dengan konflik tersebut mempersepsikan bahwa kehadiran kekuatan Iran adalah ancaman bagi sekutunya yang menggunakan Selat Hormuz sebagai rute perdagangan dalam hal ini adalah Arab Saudi, Yordania, Mesir dan lainnya.

Benturan kepentingan yang terjadi di Selat Hormuz akan semakin meningkat mengingat AS adalah kekuatan *super power* dan Iran dapat dikatakan sebagai *new emerging power* yang berpotensi menjadi *new emerging super power* di kawasan Timur Tengah. Merujuk pada Thomas Juneau menyebutkan “kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah tidak tertandingi oleh kekuatan di dalam kawasan dan dari luar kawasan. AS dapat merespon dengan cepat terhadap permasalahan jangka pendek dan memiliki kapasitas yang memadai karena AS telah memposisikan aset-asetnya dan tidak tertandinginya persediaan logistik dan transportasi kapabilitas. AS dalam kekuatan militer dapat memproyeksikan dan mempertahankan kehadirannya akibat jaringan kerjasama luas dari basis dan fasilitas di Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Siprus, Yordania dan Turki” (Juneau, 2019). AS di kawasan Timur Tengah tidak menurunkan perhatiannya dalam aspek kehadiran kekuatan militer, hal ini disebabkan oleh pandangan AS yang mempersepsikan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang strategis. Intensitas AS untuk melibatkan diri di kawasan Timur Tengah menunjukkan bahwa secara strategi, politik dan ekonomi, AS tidak dapat melepaskan diri dari Timur Tengah. Perhatian AS terhadap kawasan Timur Tengah disebabkan oleh persepsi AS yang melihat kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dimana kawasan itu merupakan sumber persediaan minyak dunia yang akan berdampak pada posisi AS di perpolitikan internasional jika AS dapat menguasai kawasan Timur Tengah.

Keputusan Amerika Serikat untuk membentuk poros kerjasama dan militer di kawasan Timur Tengah sudah ditunjukkan terutama

terhadap Tehran, sebagai respon dari perkembangan kekuatan Iran untuk melakukan dominasi di kawasan. Terdapat dua prinsip kepentingan AS di konflik Selat Hormuz yakni akses dan stabilitas. Pertama, AS memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses pelayaran kapal minyak di Selat Hormuz tanpa adanya hambatan. Akses tanpa hambatan di Selat Hormuz akan sangat dibutuhkan oleh semua negara dan akan menikmati adanya kebebasan pelayaran yang tinggi. Kedua, AS memiliki kepentingan untuk terciptanya stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Sama halnya dengan kebebasan akses pelayaran, stabilitas keamanan akan menopang kesejahteraan baik di Timur Tengah dan Amerika Serikat. Bagi AS sendiri jika kawasan ini mengalami eskalasi konflik maka hal ini akan menghambat dan menjauhkan kesejahteraan karena hal ini akan menjadi hambatan terhadap distribusi sumber daya, menurunnya volume perdagangan dan investasi intra-regional.

Dalam beberapa tahun ini Selat Hormuz telah menjadi arena bagi rivalitas antara AS dan Iran. Pada tahun 2019, kapal tanker minyak Inggris *Stena Impero* yang sedang berlayar di Selat Hormuz menuju Arab Saudi mendapat pesan radio dari pasukan angkatan laut Iran untuk membalikan arah menuju perairan Iran dan kemudian *Stena Impero* di bajak oleh pasukan Iran dan dibawa ke pelabuhan Iran, tensi muali bertambah buruk bahkan sebelum peristiwa tersebut dimana spekulasi dan saling tuduh dan mengelak terkait penenggelaman dan pembajakan kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz muncul di berita terbaru dan berita utama di media global (Parvaneh, 2019). kejadian-kejadian tersebut tentu saja berdampak pada kepada peningkatan ketegangan diplomatik diantara kedua negara.

Rivalitas ini semakin terlihat nyata saat AS keluar dari perjanjian *Iran Nuclear Deal* dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran, dimana Iran merespon dengan melakukan beberapa tindakan yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik antara kedua negara. Keputusan Iran untuk melakukan konfrontasi langsung terhadap AS dan sekutu-sekutunya melalui pemblokadean di Selat Hormuz menunjukkan sikap kesiapan Iran untuk berhadapan langsung dengan AS apabila jalur diplomasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan kedua negara. bahkan dalam pernyataan resmi pemerintah Iran menyebutkan bahwa negaranya telah mengupayakan jalur negosiasi tetapi AS tidak mau memberikan Iran kesempatan, maka Iran akan terus melakukan pemblokadean Selat Hormuz agar sekutu-sekutu AS mau terus berkomitmen dalam perjanjian *Iran Nuclear Deal* dan AS agar mencabut kembali sanksi ekonominya.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini terlihat bahwa faktor *enmity* sebagai dasar rivalitas antara Iran dan AS tidak dapat dilepaskan dari persaingan untuk mempertahankan dan mengubah distribusi kekuatan yang merujuk kepada hegemoni di kawasan Timur Tengah melalui persaingan kekuatan militer. Kawasan Timur Tengah telah menjadi panggung pertarungan bagi Iran sebagai *the new emerging power* dan AS sebagai *established great power* dalam upaya saling menunjukkan kekuatan negaranya masing-masing. Persaingan kekuatan tersebut menjadi corak warna dalam dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan perkembangan kekuatan Iran yang berfokus pada program

pengembangan nuklir Iran. Pembangunan kekuatan Iran kemudian di respon oleh AS dengan mengembalikan fokus pengaruhnya di Timur Tengah. Persaingan Iran dan AS tidak hanya dalam konteks kepemilikan alutsista dan militer tetapi telah masuk ke dalam ranah konfrontasi terkait aksi provokasi antara kedua negara dalam manuver masing-masing kedua negara di Selat Hormuz. Dengan demikian, dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu kedepan tidak akan dilepaskan dari kajian mengenai rivalitas kekuatan diantara Iran dan AS, meskipun tidak menutup kemungkinan munculnya aktor baru yang akan meramalkan dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.

Referensi

Buku

- Acharya, A. (2002). *Regionalism and Multilateralism : Essay on Cooperative Security in the Asia Pacific*. Singapura : Eastern University Press.
- Buzan, B. (1987). *People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. London: MacMillan Press London.
- Buzan, B. & Waever, O. (2003). *Region and Power The Structure in International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- El-Gogary, A. (2006). *Ahmadinejad: The Nuclear Saviour of Tehran "Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis"*. Terjemahan Kuwais, T. Depok: Pustaka Iman.
- Odgaard, L. (2003). *The Balance of Power in Asia-Pacific Security US-China Policies on Regional Order*. London: Routledge.

Rahman, A. M. (2003). *Iran Pasca Revolusi "Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif"*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal

Hufbauer, G. C. & Woollacoot, J. C. (2012). Trade Dispute Between China and United States: Growing Pains so Far, Worse Ahead? Dalam Herrmann, C. & Terhechte, J.P (eds) *European Yearbook of International Economic Law (EYIEL)*, 2, 35.

Jabber, P. (1980). U.S Interests and Regional Security in the Middle East. *MIT Press*, 109(4), 68.

Ikenso, D. (2012). Trade Policy Priority One : Avertng a U.S-China "Trade War". *Free Trade Bulletin* (47), 2.

Jurnal Online

Blanchard M. C. (2009, 30 April). Saudi Arabia: Background and US Relations. *Congressional Research Service*; Cordesman, A. & Willner, A. Iran and the Gulf Military Balance. *CSIS*, (Juni 2012, 28 Juni).

Juneau, T. (2019, 11 Oktober). US Power in the Middle East: Not Declining. *Middle East Policy Council*, 21(2), diakses <https://www.mepc.org/us-power-middle-east-not-declining>

Lostumbo, M. et al. (2013). Overseas Basing of US Military Forces: An Assessment of Relative Costs and Strategic Benefits. *RAND Corporation* diakses https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR201.html

Artikel Online

Abrams, E. (2013, 7 Mei). Syria, Russia, and American Weakness. *Council on Foreign Relations*. Diakses <https://www.cfr.org/blog/syria-russia-and-american-weakness>

- Admiral Shamkhani, A. (2018, 2 Juni). "Security of Syria is equivalent with security of Iran". Iran Online, <http://www.ion.ir/News/366810.html>; dalam Barzegar, K. (2018, 9 September) "The Iranian Factor in the Emerging Balance of Power in the Middle East". Diakses <http://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/09/iranian-factor-emerging-balance-power-middle-east-180909084735167.html>
- Barzegar, K. (2018, 9 September). "The Iranian Factor in the Emerging Balance of Power in the Middle East". Diakses <http://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/09/iranian-factor-emerging-balance-power-middle-east-180909084735167.html>
- Lipin, M. & Seldin, J. (2013, 30 Agustus). "US Military Has Myriad Ways to Strike Syria in Potential Operation". Diakses <https://www.voanews.com/usa/us-military-has-myriad-ways-strike-syria-potential-operation>
- Parvaneh, D. (2019, 22 Agustus). "Why the US and Iran Fighting Over This Tiny Waterway". *Vox*. Dikutip dari https://www.youtube.com/watch?v=cUBg6Qp_N98
- The Guardian. (2012, 6 Februari). "Iran Oil Exports: Where Do They Go". Diakses <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/feb/06/iran-oil-exports-destination>
- Reuters (2019, 29 Juli). "Iran's Foreign Policy is to Confront American Hegemony: Iran Vice President". Diakses <https://www.reuters.com/article/us-mideast-iran-jahangiri/irans-foreign-policy-is-to-confront-american-hegemony-iran-vice-president-idUSKCN1UO10I>
- Zarif, J. M. (2017, 10 Agustus). "Iran's foreign policy priority in the new government". Diakses <https://www.mehrnews.com/news/4053673/>

Dokumen

US Department of Defense (2013, 7 Desember) Pidato Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel dalam Konferensi Dialog Manama. Diakses <http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5336>